

Nama: Vika Janfira

NPM: 2213053040

Kelas: 2B

Analisis Vidio

Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia, Oleh Prof. Jimly Asshiddiqie

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia diawali dengan dikeluarkannya UUD Pemuda tahun 1928 yang menguatkan tekad untuk menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian, pada tahun 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi pertama Indonesia. Belakangan, beberapa perubahan dilakukan terhadap konstitusi (1945), baik secara substantif maupun teknis.

Perkembangan pelaksanaan konstitusi di Indonesia juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awal kemerdekaan, penerapan konstitusi masih diwarnai dengan ketidakstabilan dan keresahan politik. Namun, implementasi konstitusi telah membaik dari waktu ke waktu, terutama setelah reformasi tahun 1998 yang mengarah pada reformasi kelembagaan, termasuk reformasi hukum dan tata negara.

Interpretasi konstitusi juga merupakan bagian penting dari pembangunan ketatanegaraan di Indonesia. Prof. Jimly menegaskan, penafsiran UUD harus konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan konsisten. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan ketatanegaraan.

Pengawasan konstitusional juga merupakan bagian penting dari pembangunan konstitusional di Indonesia. Salah satu lembaga pengawas konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang berperan untuk menengahi perselisihan yang timbul dari hasil pemilu dan menyelidiki serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan UUD 1945. Tugasnya mengawasi konstitusi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pelestarian Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembangunan konstitusional merupakan aspek terakhir dari pembangunan ketatanegaraan di Indonesia. Tujuan pembangunan konstitusi adalah untuk meningkatkan kualitas konstitusi itu sendiri agar lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Proses pembentukan konstitusi Indonesia masih berlangsung melalui proses amendemen UUD 1945 dan upaya reformasi hukum dan tata negara.